

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	
Media Online	Mitra Post

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Terima LHP, DPRD Jateng Segera Tindaklanjuti Rekomendasi dari BPK

<https://mitrapost.com/2022/01/12/terima-lhkp-dprd-jateng-segera-tindaklanjuti-rekomendasi-dari-bpk/>

Semarang, Mitrapost.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Ferry Wawan Cahyono menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng pada Selasa (11/1/2022).

Terdapat dua laporan dari BPK Jateng, pertama LHPK atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester II 2021.

Laporan yang kedua adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Usai menerima LHPK, DPRD akan segera menindaklanjuti temuan serta rekomendasi yang diberikan BPK. Berdasarkan aturan yang berlaku, rekomendasi wajib untuk ditindaklanjuti oleh lembaga publik selama waktu 60 hari setelah laporan diterima.

"Ini merupakan informasi yang sangat baik dan kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih serta berharap untuk temuan-temuan ini akan menjadikan dasar untuk saling menyempurnakan dan membekali kerja sama yang telah kami lakukan dengan baik selama ini," ungkap Ferry.

Dalam acara penyerahan LHPK, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ayub Amali turut menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada sejumlah daerah seperti Pemprov Jateng yang diterima Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, selanjutnya Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan DPRD Sukoharjo, beserta sekda masing-masing.

Ayub menjelaskan, BPK Jateng telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut BPK merekomendasikan kinerja pelaksanaan vaksin yaitu agar dapat menyusun kertas kerja pengalokasian vaksin logistik sarana dan prasarana, kemudian dapat melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran distribusi vaksin serta berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait perbaikan data aplikasi PCR.

Terkait rekomendasi untuk kinerja vokasi antara lain agar dapat menyusun strategi pemagangan pendidik vokasi di industri dan dunia kerja (IDUKA) sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pelibatan praktisi.

Ia juga menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) pembina SMK memantau proses sinkronisasi kurikulum sekolah. (*)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH